

Sebuah Solusi untuk Perkembangan UMKM di Indonesia

Erlangga Budi Sanggrama

Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi Universitas Kristen Maranatha
(Jl. Suria Sumantri No. 65, Bandung)
sanggrama12@gmail.com

Rhaisya Setiawati Rachmat

Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi Universitas Kristen Maranatha
(Jl. Suria Sumantri No. 65, Bandung)
icha.rhaisya@gmail.com

Se Tin

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha
(Jl. Suria Sumatri No. 65, Bandung)
setin2005@yahoo.com

Abstract

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) contribution to Indonesian economy can't be underestimated. MSMEs on overall perspective is a media to absorb huge labour force and contribute a decent portion to gross domestic product. However, there are still some obstacles for the MSMEs to develop their business such as limited capital, difficulties on obtaining loan, and disorganised asset management.

Having a comprehensive bookkeeping system is a solution that can be applied in order to handle those obstacles because bank and other financial institution will see better credibility on MSMEs moreover, people who run MSMEs will have more useful information regarding their asset in business which will make them better in making decision. Unfortunately, the resources needed to have and run such bookkeeping system are quite complicated and usually neglected by MSMEs.

Unlike other paper that focus on testing hypothesis regarding SMEs, this paper focus on providing a solution to help MSMEs development by building a special committee made of academics (lecturers) and students of accounting major from several universities that continually devote themselves to MSMEs so they can have and run a comprehensive bookkeeping system. This program is run by preliminary survey to choose qualified SME and then delegating committee member to help the chosen SME. This program can increase SME performance which will increase gross domestic product and government income through taxes.

Keywords: SME, Accountant, Contribution

Abstrak

Unit usaha mikro, kecil, dan menengah tidak dapat diremehkan kontribusinya terhadap perekonomian khususnya di Indonesia. UMKM secara keseluruhan merupakan media penyerapan tenaga kerja yang besar dengan kontribusi yang tidak sedikit terhadap produk domestik bruto. Namun masih terdapat tantangan bagi UMKM dalam mengembangkan bisnisnya seperti keterbatasan modal dan pengelolaan aset unit usaha yang belum tertib.

Memiliki sistem pembukuan yang komprehensif adalah salah satu solusi untuk mengatasi kedua masalah tersebut karena akan membuat unit usaha lebih kredibel. Hal itu juga membuat UMKM memiliki informasi yang lebih lengkap atas posisi aset mereka sehingga pengambilan keputusan bisnis akan lebih baik. Sayangnya sumber daya yang diperlukan untuk memiliki sistem pembukuan yang komprehensif cukup rumit dan biasanya tidak menjadi prioritas.

Berbeda dengan tulisan UMKM lain yang membahas pengujian hipotesis, tulisan ini fokus pada menghadirkan solusi untuk membantu perkembangan UMKM dengan membentuk komite khusus yang terdiri dari dosen dan mahasiswa akuntansi universitas yang mengabdikan diri kepada UMKM untuk menciptakan dan mengelola sistem pembukuan yang komprehensif. Program ini dijalankan melalui survey pendahuluan untuk pemilihan UMKM dan dilanjutkan dengan penugasan anggota komite untuk membantu UMKM terpilih. Program ini dapat membantu meningkatkan kinerja UMKM dan sekaligus meningkatkan produk domestik bruto nasional serta meningkatkan penerimaan pemerintah melalui pajak.

Keywords: UMKM, Akuntan, Kontribusi

Pendahuluan

Unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak dapat dipandang sebelah mata atas kontribusinya bagi ekonomi Indonesia. Sudah banyak *startup* Indonesia yang berhasil membuktikan kesuksesan mereka sampai tingkat dunia, diantaranya GO-Jek, Traveloka, dan Tokopedia, mereka hampir mencapai status *startup Unicorn* (Jaya et al, 2017). Jika dilihat dari aspek tenaga kerja, UMKM dapat dikatakan sebagai media penyerapan tenaga kerja yang besar. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2016, 98,68% populasi usaha kecil dan menengah di Indonesia berasal dari sektor non pertanian dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (BPS SE, 2016).

Lima tahun terakhir muncul suatu konsep baru yang dinamakan *startup*. Meski memiliki istilah yang berbeda, namun pada dasarnya *startup* yang dimaksud disini sama dengan membuka bisnis baru yang biasanya memiliki penyertaan modal yang kecil dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit sehingga masih dapat disebut sebagai kategori UMKM jika mengacu pada UU nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

Kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian dan maraknya pendirian usaha baru akan menjadi sia-sia jika hal tersebut tidak memiliki *going concern* yang baik. Faktanya, angka kegagalan *startup* di seluruh dunia bisa mencapai 90%. (Perdani et al, 2018). Tantangan yang dialami oleh UMKM akan menghambat perkembangan dan bahkan menghentikan kinerja UMKM tersebut. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh wirausahawan UMKM adalah

terkait dengan pengelolaan dana (Kurniawati et al, 2012). Sumber modal dapat berasal dari modal sendiri, investor, atau pinjaman kreditur. Jika modal sendiri tidak mencukupi maka jalan lain yang dapat ditempuh adalah mencari investor yang tertarik atau mencari kreditur yang bersedia meminjamkan. Beberapa hal yang dapat meyakinkan investor atau kreditur adalah kredibilitas UMKM itu sendiri dan bagaimana UMKM itu mengelola aset bisnisnya. Hal ini tercermin dalam laporan keuangan melalui sistem pembukuan dan sayangnya sistem pembukuan UMKM selama ini masih sangat sederhana dan cenderung mengabaikan kaidah administrasi keuangan yang standar baku (Handayani et al, 2016). Bahkan diantaranya masih banyak yang belum melakukan aktivitas pembukuan maupun proses akuntansi dalam mengelola transaksi ekonomi yang terjadi pada unit usahanya karena keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi, tingkat pendidikan yang rendah, persepsi yang menganggap bahwa aktivitas pembukuan tidak penting untuk perusahaan, serta tidak adanya dana yang cukup untuk mempekerjakan akuntan atau membeli software akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi (Lestari, 2019; Pratiwi dan Hanafi, 2016; Soraya dan Mahmud, 2016; Rahmawati dan Puspasari, 2016; Rudiantoro dan Siregar, 2012). Hal serupa tidak hanya terjadi di Indonesia. Secara global, rata-rata usaha kecil dan menengah tidak memiliki pencatatan keuangan yang baik karena mereka tidak sadar akan pentingnya akuntansi dan pelaporan keuangan untuk pengendalian dan pengambilan keputusan (UNCTD, 2000). Meskipun terdapat banyak perangkat lunak akuntansi yang dapat membantu pencatatan keuangan unit usaha dengan harga terjangkau seperti Accurate namun UMKM biasanya tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola dan menjalankan fungsinya sehingga biasanya mereka mendelegasikan fungsi

tersebut dengan cara *outsourcing* ke pihak luar (Ismail, 2002).

Mendelegasikan fungsi pembukuan atau fungsi akuntansi ke pihak luar dengan cara *outsourcing* adalah salah satu alternatif bagi UMKM agar memiliki laporan keuangan yang baik sehingga dapat lebih meyakinkan investor atau kreditur untuk memperoleh suntikan dana tambahan bagi perkembangan usaha. Namun fungsi dari sistem pembukuan dan laporan keuangan khususnya bagi UMKM tidak hanya untuk kepentingan memperoleh suntikan dana. Akuntansi berbicara tentang informasi keuangan suatu unit usaha dan dipakai untuk pengambilan keputusan. UMKM yang memiliki sistem pembukuan yang baik dan komprehensif akan memiliki informasi yang dapat dipakai untuk mengembangkan usahanya atau mengatur strategi bisnis lainnya sehingga dapat tetap bersaing di dunia bisnis. Sebagai contoh, UMKM yang melakukan *outsource cost accounting* dan menerapkan *activity-based costing* akan memiliki informasi yang lebih komprehensif atas produk-produknya sehingga dapat menetapkan harga jual yang lebih kompetitif di pasar dan mengeliminasi aktivitas yang tidak memberikan *value-added* bagi pelanggan.

Meskipun UMKM dapat mendelegasikan fungsi akuntansi ke pihak luar dengan cara *outsourcing* ke pihak luar seperti Kantor Jasa Akuntansi, tidak menutup kemungkinan bahwa pada akhirnya akan ada UMKM tidak akan menyewa jasa akuntan eksternal untuk mengelola pembukuan mereka karena keterbatasan dana yang telah disebutkan sebelumnya. Karena itu, diperlukan alternatif atau pilihan lain yang dapat membantu UMKM dalam hal ini. Atas dasar itulah penulis menyusun tulisan ini untuk menghadirkan pilihan dan solusi baru yang akan membantu UMKM dalam hal pembukuan atau sistem akuntansi dengan melibatkan mahasiswa (terutama mahasiswa tingkat akhir) dan dosen akuntansi.

Sebuah sistem yang melibatkan dosen akuntansi, mahasiswa akuntansi tingkat akhir, dan lembaga pengelola UMKM seperti dinas koperasi dan UMKM seharusnya dapat memberikan manfaat baik bagi UMKM itu sendiri maupun bagi ilmu akuntansi secara umum. Dosen akuntansi dan mahasiswa akuntansi yang terlibat langsung membantu penciptaan dan pengelolaan sistem akuntansi UMKM dinilai sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup serta dapat memberikan manfaat bagi UMKM. Selanjutnya, keberagaman jenis bisnis pada UMKM akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen akuntansi sebagai akademisi untuk menerapkan konsep terbaik di dunia bisnis dan menjadi peluang untuk mengembangkan akuntansi sesuai kebutuhan dunia bisnis.

Kerangka Teoritis

Tinjauan Pustaka

Definisi dan Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM memiliki kriteria tertentu, yaitu:

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Peran Akuntan Eksternal terhadap Kinerja UMKM

Akuntansi mengolah data keuangan menjadi suatu informasi yang dapat dipakai pengguna dalam mengambil keputusan bisnis. Meskipun pengelolaan data keuangan menjadi informasi keuangan dalam sistem pembukuan dapat dilakukan oleh perangkat lunak, tetap dibutuhkan orang yang memiliki latar belakang pengetahuan yang tepat untuk dapat mengimplementasikan perangkat lunak tersebut dan memastikan bahwa data yang diolah tidak keliru dan sesuai dengan standar yang berlaku. Bagi UMKM yang memiliki dana terbatas, mempekerjakan akuntan yang kompeten adalah hal yang sulit apalagi tidak semua pengelola UMKM mengerti apa kriteria akuntan kompeten yang dapat dipekerjakan. Karena itu, sebagian besar usaha kecil dan menengah mengambil sumber daya tersebut dari luar dengan sumber utama adalah akuntan eksternal (Blackburn, et al, 2018).

UMKM di negara lain banyak memilih memindahkan fungsi akuntansi ke pihak luar dengan cara *outsourcing* ke akuntan eksternal. Britania Raya, Australia, dan Belgia adalah contoh negara dimana lebih dari 80% UMKM nya memilih *outsourcing* akuntan eksternal (De Bruyckere, et al, 2017). Namun belum terdapat penelitian

empiris mengenai seberapa banyak unit usaha kecil di Indonesia yang menggunakan jasa akuntan eksternal untuk kepentingan keuangan internal mereka.

Peran akuntan eksternal ini ternyata signifikan bagi UMKM. Mengalihkan fungsi pembukuan dan keuangan lain ke akuntan eksternal mengurangi kelemahan kompetitif UMKM sehingga mereka dapat melakukan aktivitas bisnis dengan lebih efisien. Selain itu, dengan menukarkan biaya tetap dari mempekerjakan akuntan internal sendiri yang kapasitasnya terbatas ke biaya variabel dengan kapasitas lebih baik dan lebih fleksibel membuat aktivitas yang sebelumnya sulit dikelola oleh UMKM dapat diubah menjadi aktivitas yang lebih efisien untuk perkembangan bisnis (Barrar et al, 2002).

Terdapat penelitian lain yang memberikan hasil senada. Pembelian jasa konsultasi eksternal oleh UMKM memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja UMKM tersebut. Pengaruh ini semakin diperkuat jika pada saat yang sama UMKM tersebut membeli jasa audit dari akuntan eksternal.

Enterprise Resource Planning (ERP)

Sistem ERP adalah paket sistem perangkat lunak perusahaan yang membantu organisasi untuk mengelola sumber daya secara efektif (material, sumber daya manusia, keuangan, dan sebagainya) dengan cara menyediakan solusi terintegrasi atas pemrosesan informasi yang dibutuhkan (Saini et al, 2013). *Enterprise Resource Planning (ERP)* terdiri dari beberapa set perangkat lunak yang digunakan untuk mengintegrasikan fungsi didalam suatu perusahaan atau organisasi (Bajahzar et al, 2012). Menurut Bajahzar et al (2012), manfaat penerapan ERP ada enam, yaitu efisiensi, laporan yang lebih baik, komunikasi yang lebih baik, integritas dan keamanan data, standarisasi proses, serta kepuasan pelanggan yang lebih baik.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian konseptual karena penelitian ini mendesain beberapa konsep untuk digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Subjek penelitiannya adalah UMKM di Indonesia. Metode yang dilakukan untuk menciptakan tulisan konseptual ini adalah dengan melakukan studi literatur disertai dengan hasil mengikuti seminar terkait UMKM.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

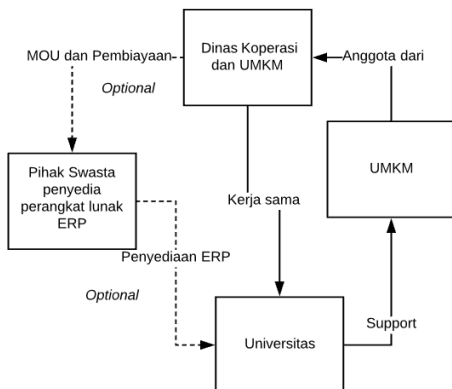
Konsep ini dinamakan **Program Pengabdian Akademisi untuk UMKM**. Hal yang menjadi fokus dalam konsep ini adalah membantu UMKM memperoleh informasi keuangan atas unit usahanya. Manifestasi akhir atas hal tersebut adalah laporan keuangan secara periodik dan laporan finansial lainnya yang dibutuhkan oleh *founder* atau pengelola utama unit usaha seperti laporan biaya produksi, analisis *standard cost* dan *actual cost* (untuk UMKM di bidang produksi), serta analisis *top customer* dengan memperhatikan penjualan dan *account receivable aging*. Meskipun secara teknis hal-hal tersebut sudah tersedia pada beberapa perangkat lunak akuntansi yang dapat dijangkau oleh UMKM (seperti Accurate Online dan SAP Business One SME Edition), namun diperlukan orang yang tepat (dalam hal ini Akuntan) untuk mengolah dan menerjemahkan informasi laporan tersebut. Kemudian, tidak semua UMKM mampu mempekerjakan akuntan yang cukup mahir agar mau bekerja dengan mereka. Menyewa jasa akuntan eksternal pun memerlukan dana yang tidak sedikit dan akan terasa memberatkan bagi sebagian UMKM.

Suatu bentuk pengabdian para akademisi kepada masyarakat adalah salah satu solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Dosen akuntansi dan mahasiswa tingkat akhir akuntansi dalam konsep ini berperan

sebagai relawan yang akan membantu UMKM untuk mendesain sistem informasi akuntansi yang cocok dengan jenis usahanya dan membantu mengolah informasi tersebut agar dapat digunakan oleh pengelola UMKM untuk membuat keputusan. Pelaksanaan konsep ini memerlukan kerja sama antara pihak akademisi, lembaga sosial masyarakat, instansi pemerintah di bidang UMKM, dan beberapa pihak swasta (untuk keperluan pengadaan perangkat lunak yang tidak kaku dan fleksibel disesuaikan dengan jenis usaha UMKM).

Terdapat bantuan dari pemerintah bagi UMKM dalam aspek pembukuan dan pengelolaan bisnis UMKM contohnya seperti kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan beserta 27 instansi lainnya (Uly, 2019). Perjanjian kerjasama tersebut berkomitmen untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada UMKM dalam hal pembukuan, perpajakan, dan pencatatan keuangan. Namun pembinaan ini tidak akan efektif jika tidak disertai pendampingan oleh orang yang tepat yaitu akuntan apalagi seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa peran akuntan eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMKM (Carey, 2015).

Secara visual, penerapan konsep ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Visualisasi Konsep Pengabdian

Peran dari setiap pihak akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikut.

Peran Setiap Pihak

Peran Instansi Pemerintah

Dalam konsep ini, instansi pemerintah yang memiliki peran utama adalah dinas koperasi dan usaha kecil menengah. Instansi ini adalah wadah seluruh UMKM di Indonesia dan memiliki data semua UMKM yang terdaftar di regional masing-masing. Peran instansi ini dapat dibagi menjadi tiga peran utama yaitu:

a) Peran pemilihan UMKM yang layak diberikan support oleh Akademisi

Dalam konsep ini, tidak semua UMKM dapat diberikan pendampingan oleh para akademisi. Instansi dapat memilih UMKM mana saja yang dinilai memiliki potensi atau konsep bisnis yang menarik dan menjanjikan namun belum memiliki sistem pembukuan yang baik. Pembatasan jumlah UMKM yang dipilih juga disebabkan karena keterbatasan jumlah pihak akademisi yang dapat mendampinginya.

b) Peran pembiayaan untuk operasional akademisi

Konsep ini memerlukan dana untuk operasional terutama untuk operasional para akademisi selama membantu UMKM. Peran instansi disini adalah menggunakan anggaran yang sudah disiapkan sebagai dana pengembangan UMKM untuk membiayai proses operasional para akademisi dalam melakukan pendampingan kepada UMKM. Adapun pembiayaan operasional yang dimaksud dalam hal ini adalah seperti akomodasi dan uang saku para akademisi sehingga UMKM tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Estimasi nilai dana yang diperlukan untuk operasional ini adalah sebagai berikut (per bulan per UMKM):

Tabel 1
Estimasi Biaya Operasional Per Bulan.

Jenis Biaya	Estimasi Per Bulan
Uang <i>transport</i> per kunjungan Dosen Pembina (Rp 25,000 per hari) (Asumsi 2x kunjungan per minggu)	Rp 200,000
Uang makan per kunjungan Dosen Pembina (Rp 25,000 per hari) (Asumsi 2x kunjungan per minggu)	Rp 200,000
Uang <i>transport</i> per kunjungan Mahasiswa Sukarela (Rp 20,000 per hari) (Asumsi 4x kunjungan per minggu).	Rp 400,000
Uang makan per kunjungan Mahasiswa Sukarela (Rp 20,000 per hari) (Asumsi 4x kunjungan per minggu).	Rp 400,000
Total	Rp 1,200,000

Sumber Tabel: Data Olahan

c) Peran pembiayaan untuk pengadaan ERP atau perangkat lunak khusus untuk digunakan UMKM.

Hal ini merupakan opsional atau pilihan namun jika diterapkan akan membantu perkembangan UMKM secara signifikan. Pendampingan yang dilakukan oleh akademisi dalam mendesain dan mengelola pembukuan UMKM dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan perangkat lunak gratis seperti *Google Sheet*. Namun jika instansi memiliki anggaran lebih yang dapat dialokasikan untuk mensubsidi ERP kepada UMKM seperti *Accurate Online*, *SAP Business One for SME*, atau ERP lainnya maka pengolahan informasi keuangan bagi UMKM akan menjadi lebih efektif. Alternatif

lainnya, instansi dapat mengeluarkan dana khusus kepada pihak swasta untuk mendesain ERP khusus yang fleksibel namun informatif bagi UMKM. ERP ini menjadi hak milik instansi dan dapat selalu digunakan oleh UMKM terpilih.

Berikut adalah estimasi pembiayaan per bulan per UMKM dengan beberapa pilihan ERP.

Tabel 2
Estimasi Biaya ERP

Jenis Biaya	Estimasi Per Bulan
Accurate Online (Biaya per bulan) (ERP Subscription Rp 220,000 per bulan) Asumsi extra 2 user per bulan @ Rp 22,000)	Rp 264,000
Excel Based Bookkeeping	-
SAP B1 for Small and Medium Enterprise (Biaya per bulan)	Rp 1,200,000
Custom ERP (Estimasi biaya pengembangan awal Rp 50,000,000) (Estimasi biaya perawatan software Rp 200,000 per bulan per UMKM)	Rp 200,000

Sumber Tabel: Data Olahan

Peran Akademisi di Universitas

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa akuntan eksternal memiliki peran yang signifikan terhadap kinerja UMKM. Dalam konsep ini peran akuntan eksternal akan digantikan oleh tim akademisi dari universitas yang dipimpin oleh satu dosen pembimbing beranggotakan satu atau lebih mahasiswa tingkat akhir. Konsep ini adalah kesempatan bagi akademisi universitas untuk memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat dengan cara membantu UMKM dalam mendesain dan mengelola sistem pembukuan mereka.

Pihak universitas akan mengumpulkan mahasiswa akuntansi yang memenuhi syarat dan bersedia menjadi relawan untuk menjadi anggota tim yang akan aktif secara langsung membantu UMKM dalam mengelola sistem pembukuan mereka. Pelaksanaannya akan dibimbing oleh satu dosen yang akan memberikan arahan dan konsultasi lebih detail. Pengabdian ini akan memberikan mahasiswa pengalaman dan bekal yang dapat dipakai untuk berkontribusi lebih lanjut setelah mereka lulus.

Lebih jauh lagi, Universitas dapat membuat pengabdian ini sebagai bentuk pengganti dari Skripsi atau Tugas Akhir para mahasiswa. Skripsi belum tentu memberikan dampak atau kontribusi langsung bagi masyarakat, namun pengabdian kepada UMKM ini akan memberikan kontribusi langsung dan pada saat yang sama memberikan mahasiswa ilmu serta pengalaman yang akan menjadi bekal setelah mereka menyelesaikan studi. Pengalaman tersebut akan membuat mahasiswa akuntansi lebih matang di dunia industri dan bisnis dan siap untuk berkontribusi langsung. Durasi pengabdian ditentukan selama minimal 6 bulan atau dapat diperpanjang hingga 1 tahun. Jika mahasiswa sudah menyelesaikan program pengabdiannya, dilakukan evaluasi atas hasil pengabdian baik dari sisi UMKM maupun dari sisi mahasiswa tersebut. Jika UMKM dinilai sudah mampu mengelola pembukuan secara mandiri, program pengabdian dapat dihentikan dan tim yang didelegasikan dapat dipindahkan ke UMKM selanjutnya yang membutuhkan. Kemudian untuk mahasiswa yang terlibat, jika dinilai sudah memberikan kontribusi yang baik selama masa pengabdian, maka mahasiswa tersebut dapat melanjutkan proses kelulusannya.

Peran Pihak Swasta

Dalam konsep ini, pihak swasta yang dimaksud adalah perusahaan pengembang perangkat lunak atau ERP (*Enterprise*

Resource Planning) yang terintegrasi. Peran perusahaan ini dapat terbagi menjadi beberapa pilihan yaitu:

- a) Membuat kontrak dengan instansi untuk memberikan harga khusus atas produk perangkat lunak atau ERP yang sudah siap dipakai (seperti Accurate Online, MYOB, atau SAP Business One for SME). Biaya atas program dengan harga tersebut dibayar oleh instansi dan dapat dipakai selama program pengabdian ini berlangsung. Jika program sudah selesai, UMKM diberi pilihan untuk melanjutkan penggunaan dengan harga tetap atau melakukan pemindahan informasi keuangan ke platform lain yang dipilih oleh UMKM.
- b) Membuat kerjasama dengan instansi untuk membuat suatu perangkat lunak atau ERP khusus yang menjadi hak milik instansi. ERP ini karena merupakan hak milik instansi, dapat digunakan oleh UMKM selama UMKM tersebut terdaftar di instansi. Setelah kontrak pembuatan ERP atau perangkat lunak selesai, perusahaan swasta hanya dikontrak untuk melakukan perawatan dan pembaharuan yang diperlukan.

Peran pihak swasta disini bersifat opsional atau tidak wajib. Pembiayaan instansi untuk pengadaan ERP atau perangkat lunak dalam program pengabdian akan memberikan nilai tambah bagi UMKM terpilih dan menjadi peluang belajar bagi tim akademisi. Namun tanpa perangkat lunak atau ERP ini, tim akademisi masih dapat membantu pembukuan UMKM dengan menggunakan platform lain yang gratis seperti memanfaatkan *Google Sheets*.

Peran UMKM

UMKM disini adalah UMKM yang terpilih oleh instansi berdasarkan kriteria tertentu seperti konsep bisnis yang menarik dan potensinya terhadap perekonomian Indonesia. Proses pembukuan akan dibantu

oleh tim akademisi sehingga pengelola UMKM dapat fokus pada pengembangan bisnis dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Pengelola akan diberikan informasi keuangan oleh tim akademisi dengan wujud laporan keuangan dan laporan lainnya yang diperlukan ditambah penjelasan khusus dari tim akademisi tentang bagaimana cara terbaik memanfaatkan informasi tersebut sehingga keputusan bisnis UMKM dapat dilakukan berbasis data dan menjadi lebih *accountable*. Laporan tersebut dapat juga digunakan oleh UMKM untuk memperoleh suntikan dana tambahan baik dari investor maupun kreditor.

Setelah masa program pengabdian berakhir, UMKM memiliki pilihan untuk melanjutkan program *outsourcing* pembukuan tanpa dana bantuan dari instansi pemerintah atau mengambil alih proses pembukuan untuk dikelola secara mandiri. Tim akademisi wajib melakukan serah terima informasi keuangan beserta informasi mengenai sistemnya kepada penerus sistem baik itu akuntan eksternal lain ataupun pihak internal dari UMKM itu sendiri. Pada akhir masa program pengabdian diharapkan UMKM sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk mengelola informasi keuangan dan menggunakannya untuk mengembangkan bisnis.

Urutan Kronologis Pelaksanaan Program Pengabdian

Sebelum menerapkan program ini, ada proses *preliminary* atau persiapan yang diperlukan. Bekerja sama dengan perusahaan swasta di bidang pengembangan perangkat lunak akuntansi atau ERP adalah hal yang tidak wajib namun jika ingin dilakukan, maka instansi pemerintah perlu menentukan perusahaan mana yang akan menjadi rekan dalam menjalankan program pengabdian ini.

Selanjutnya suatu komite khusus perlu didirikan yang beranggotakan dari instansi pemerintah khususnya instansi yang terlibat

langsung dengan UMKM, Dosen dari universitas yang bersedia bekerja sama dengan instansi pemerintah untuk menjalankan program ini, asosiasi atau lembaga yang menjadi wadah berkumpulnya UMKM, dan pihak swasta yang dipilih oleh instansi untuk menyediakan *support* berupa perangkat lunak atau ERP yang dibutuhkan. Komite ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan pemerintah, UMKM, dan akademisi.

Tugas komite ini tidak hanya sebagai media komunikasi dan koordinasi namun juga sebagai wadah untuk mengembangkan keilmuan. Berbagai variasi bisnis UMKM dapat dijadikan sebagai ladang bagi para akademisi untuk mengembangkan ilmu dan pihak swasta untuk mengembangkan perangkat lunak dan ERP sesuai kebutuhan bisnis yang dinamis.

Setelah komite dibentuk, program pengabdian ini dapat dilakukan dalam 5 langkah selanjutnya yaitu:

- 1) Survey pendahuluan
- 2) Pemilihan UMKM
- 3) Pendelegasian tim akademisi
- 4) Pelaksanaan program
- 5) Evaluasi dan serah terima

Survey Pendahuluan

Pada tahap ini, tim ahli dari komite melakukan penggalan informasi atas semua UMKM yang terdaftar atau tercatat di instansi atau di lembaga sosial masyarakat. Tim ahli mengumpulkan beragam informasi seperti konsep bisnis, potensi ekonomis, dan informasi demografis lainnya yang tidak hanya membantu pendataan namun juga sebagai informasi pelengkap untuk pemilihan UMKM yang akan dibantu.

Pemilihan UMKM

Pada tahap ini, komite melakukan penyaringan atas UMKM mana saja yang dinilai layak diberikan bantuan berupa pendelegasian tim akademisi untuk mengelola informasi keuangan mereka. Kriteria yang ditetapkan untuk memilih

UMKM dapat ditentukan sesuai kebutuhan perekonomian di Indonesia ataupun dapat dipilih berdasarkan indikator lain seperti potensi penyerapan tenaga kerja jika UMKM tersebut berkembang dan potensi kontribusi produktivitas UMKM tersebut terhadap perekonomian nasional.

Pendelegasian Tim Akademisi

Setelah komite mencapai kesepakatan atas daftar UMKM yang layak diberikan bantuan, komite akan menunjuk dosen anggota komite untuk membantu UMKM tersebut dalam mendesain sistem pembukuan yang komprehensif dan membantu pengelolaan informasi keuangan yang dapat dipakai pengelola UMKM dalam pengambilan keputusan. Dosen tersebut akan memilih satu atau lebih anggota tim yang merupakan mahasiswa tingkat akhir dari universitas tempat dosen tersebut mengajar sebagai pelaksana teknis program pengabdian.

Satu dosen dapat didelegasikan untuk satu hingga tiga UMKM tergantung dari ketersediaan dosen dan kompleksitas bisnis UMKM tersebut. Namun anggota tim hanya dapat didelegasikan untuk satu UMKM saja agar anggota tersebut dapat memberikan bantuan yang fokus dan penuh komitmen. Artinya dalam hal ini karena tugas dosen sebagai ketua tim adalah sebagai perancang dan konsultan utama sistem pembukuan, maka tidak diperlukan komitmen waktu yang tinggi untuk satu UMKM sedangkan anggota tim yang merupakan pelaksana teknis akan lebih banyak menggunakan waktu bagi UMKM tersebut sehingga harus ada komitmen untuk satu UMKM saja.

Pelaksanaan Program

Tahap ini adalah tahap utama pelaksanaan pengabdian. Dosen sebagai ketua tim akademisi akan memberikan arahan dan melakukan kontrol selama durasi pengabdian. Aspek teknis akan dilakukan oleh anggota tim akademisi. Hal utama yang diberikan oleh tim akademisi kepada UMKM adalah sistem pembukuan yang

komprehensif untuk membantu UMKM agar memiliki informasi yang akurat dan relevan dalam pengambilan keputusan bisnis. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan ERP atau secara manual dengan menggunakan *platform spreadsheet* gratis. Bantuan ini dapat berkembang lebih jauh pada aspek lain seperti:

- Pembinaan tim akademisi kepada pengelola UMKM tentang analisis laporan keuangan.
- Penerapan *activity-based costing* pada UMKM yang bergerak di bidang industri manufaktur.
- Pembinaan atas sistem *budget* untuk perencanaan bisnis yang lebih baik.
- Pembinaan tentang kesadaran pajak.

Evaluasi Program dan Serah Terima

Program berlangsung selama minimal 6 bulan dan pada akhir durasi program, komite akan melakukan evaluasi. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam evaluasi ini antara lain adalah:

- Keberhasilan perancangan sistem pembukuan yang dinilai dari akurasi dan relevansi informasi keuangan serta *sustainability* cara kerja sistem tersebut bagi UMKM yang bersangkutan.
- Pengaruh bantuan tim akademisi terhadap kinerja bisnis UMKM.
- Penentuan apakah UMKM dapat melanjutkan sistem pembukuan yang sudah dirancang secara mandiri atau masih memerlukan perpanjangan bantuan.

Setelah evaluasi, tim akademisi akan melakukan serah terima data, informasi, *standard operating procedure* (SOP) atas sistem pembukuan, dan informasi lainnya kepada UMKM jika mereka ingin melanjutkan sendiri atau kepada pihak lain (misalnya akuntan eksternal dari Kantor Jasa Akuntansi) untuk diteruskan.

Akhir dari program evaluasi pun menjadi momen bagi dosen untuk memberikan evaluasi atas kinerja mahasiswanya dan hasil dari program pengabdian dapat

menjadi pertimbangan tambahan bagi kelulusan mahasiswa yang bersangkutan.

Selain itu, jika pengabdian ini menggunakan perangkat lunak atau ERP yang disediakan oleh pihak swasta, maka pihak swasta juga dapat melakukan evaluasi atas produknya dengan melihat apakah perangkat lunak atau ERP yang mereka ciptakan sudah mampu memenuhi kebutuhan bisnis UMKM atau memerlukan perkembangan tambahan lagi.

Pada akhirnya, setelah program pengabdian berakhir, semua pihak yang telah berkontribusi akan memperoleh nilai tambah bagi mereka sendiri dan dapat mengembangkan hal baru yang dapat dipakai dalam program pengabdian selanjutnya.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Usaha mikro, kecil, dan menengah tidak dapat dipungkiri memiliki peran yang penting bagi perekonomian nasional. Karenanya keberlangsungan UMKM perlu diperhatikan agar ekonomi tetap stabil. Salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan UMKM adalah dengan membantu beberapa hambatan yang dialami UMKM seperti masalah pembukuan.

Pembinaan saja tidak akan cukup untuk membantu UMKM dalam memiliki dan mengelola sistem pembukuan yang komprehensif karena diperlukan keahlian khusus (dalam hal ini Akuntansi) untuk dapat memahami informasi keuangan dari pembukuan. Karena itu, upaya pemerintah dalam mengembangkan UMKM harus melibatkan tim ahli akuntansi yang dalam hal ini dapat diwujudkan melalui program pengabdian dosen dan mahasiswa akuntansi untuk UMKM.

Program ini akan memberikan manfaat tidak hanya bagi UMKM yang dibantu namun juga bagi tim akademisi karena mereka memiliki kesempatan untuk menerapkan secara langsung ilmu yang

dipelajari. Program ini juga menjadi lahan untuk perkembangan lebih lanjut keilmuan tersebut agar senantiasa berkembang seiring dengan dinamika bisnis.

Jika program ini dijalankan, ada implikasi yang akan diterima oleh pemerintah dan UMKM secara simultan. Program ini akan membuat UMKM menjadi lebih terorganisir dan memiliki pengelolaan informasi keuangan dengan lebih baik. Hal ini akan mendorong peningkatan kinerja UMKM dan lebih lanjut akan memberikan kontribusi bagi pemerintah yaitu lewat peningkatan produk domestik bruto dan meningkatnya penerimaan pajak.

Saran

Meskipun tulisan ini menghadirkan sebuah solusi, wujud dari solusi ini masih bersifat konseptual sehingga masih diperlukan pengembangan lebih lanjut. Tulisan ini dapat dikembangkan dengan cara mendesain program yang lebih matang dan detail atau dijadikan dasar penelitian mengenai signifikansi peran akuntansi eksternal bagi UMKM di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018. *Potensi Usaha Mikro Kecil Sensus Ekonomi 2016*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Bajahzar, A., Alqahtani, A., and Baslem, A. 2012. Successful Implementation of Enterprise Resource Planning (ERP). 2012 *International Conference on Advanced computer Science Applications and Technologies (ACSAT)*.
- Barrar, P., Wood, D., Jones, J. and Vedovato, M. 2002. The efficiency of accounting service provision. *Business Process Management Journal*, Vol. 8 No. 3, pp. 195-217.
- Blackburn, R., Carey, P., and Tanewski, G. 2018. Business advice by accountants to SMEs: relationships

- and trust. *Qualitative Research in Accounting & Management*, Vol. 15 No. 3, pp. 358-384.
- Carey, P. 2015. External accountants' business advice and SME performance, *Pacific Accounting Review*, Vol. 27 No. 2, pp. 166-188.
- De Bruyckere, S., Verplancke, F., Everaert, P., Sarens, G., and Coppens, C. 2017. The role of external accountants as service providers for Smes: a literature review. *Accountancy & Bedrijfskunde*, (4), 49-62.
- Handayani, T. R., Susilawati, E. A. R., dan Purwanto, N. 2016. Analisis Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Layanan Pemeriksaan Histopatologi (PA) & Sitologi dr. Soebarkah Basoeki, SpPA Malang. *Journal Riset mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, Vol 01 No. 01.
- Ismail, N.A. 2002. A Framework for the study of accounting information systems in small businesses. *Accounting Today*, p. 32-35.
- Jaya, A. M., Ferdiana, R., and Fauziati, S. 2017. Analisis Faktor Keberhasilan Startup Digital Di Yogyakarta. *Prosiding SNATIF Ke-4*.
- Kurniawati, P. E., Nugroho, I. P., dan Arifin, C. 2012. Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *JMK*, Vol 10 No. 2.
- Lestari, P. E. 2019. Kesiapan UMKM Dalam Implementasi SAK EMKM Pengrajin Mebel Desa Catak Gayam, Mojowarno. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, Vol 2 No. 1.
- Perdani, K. D. M., Widyawan., dan Santoso, I. P. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Startup Di Yogyakarta. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENTIKA)*. Yogyakarta, 23-24 Maret.
- Pratiwi, B. N., dan Hanafi, R. 2016. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 5 No. 1, Hal. 79-98.
- Rahmawati, T., dan Puspasari, R. O. 2016. Mengungkap Kesiapan Implementasi SAK ETAP Dalam Menyajikan Laporan Keuangan UMKM Di Kabupaten Kuningan. *Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*.
- Rudiantoro, R., dan Siregar, V. S. 2012. Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol 9-10 No. 1.
- Saini, S., Nigam, S., and Misra, S. C. 2013. Identifying success factors for implementation of ERP at Indian SMEs. *Journal of Modelling in Management*, 8(1), 103-122.
- Soraya, A.E., dan Mahmud, A. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. *Accounting Analysis Journal*, Vol 5 No. 1.
- Uly, Y.A. 2019. Dibina Ditjen Pajak, UMKM Didorong Buat Pembukuan dan Design Ciamik, <https://economy.okezone.com/read/2019/04/30/20/2049838/dibina-ditjen-pajak-umkm-didorong-buat-pembukuan-dan-design-ciamik>, diakses pada 16 Februari 2020.

- United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD]. 2000. Promoting Transparency And Financial Disclosure: Accounting By Small And Medium-Sized Enterprises. Retrieved February 16, 2020, from <https://unctad.org/en/Docs/c2isar13.en.pdf>.
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.